



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat,

- dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sampang.
10. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada

jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

12. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berupa Satuan Pendidikan Daerah, yaitu :

- a. UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, terdiri atas :
 - 1) UPTD TKN Pembina Sampang;
- b. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :
 - 1) UPTD SDN Asemjaran 2;
 - 2) UPTD SDN Asemjaran 3;
 - 3) UPTD SDN Asemjaran 4;
 - 4) UPTD SDN Banyuates 1;
 - 5) UPTD SDN Banyuates 2;
 - 6) UPTD SDN Banyuates 3;
 - 7) UPTD SDN Banyuates 4;
 - 8) UPTD SDN Banyuates 5;
 - 9) UPTD SDN Banyuates 6;
 - 10) UPTD SDN Batioh 1;
 - 11) UPTD SDN Batioh 2;
 - 12) UPTD SDN Jatra Timur 1;
 - 13) UPTD SDN Kembang Jeruk 1;
 - 14) UPTD SDN Kembang Jeruk 2;
 - 15) UPTD SDN Larlar 1;
 - 16) UPTD SDN Larlar 2;
 - 17) UPTD SDN Larlar 3;
 - 18) UPTD SDN Larlar 4;
 - 19) UPTD SDN Masaran 1;

- 20) UPTD SDN Masaran 2;
- 21) UPTD SDN Montor 1;
- 22) UPTD SDN Montor 2;
- 23) UPTD SDN Morbatoh 1;
- 24) UPTD SDN Morbatoh 2;
- 25) UPTD SDN Morbatoh 3;
- 26) UPTD SDN Nagasareh 1;
- 27) UPTD SDN Nagasareh 2;
- 28) UPTD SDN Nepa 1;
- 29) UPTD SDN Nepa 2;
- 30) UPTD SDN Nepa 3;
- 31) UPTD SDN Olor 1;
- 32) UPTD SDN Olor 2;
- 33) UPTD SDN Planggaran Barat;
- 34) UPTD SDN Planggaran Timur 1;
- 35) UPTD SDN Planggaran Timur 2;
- 36) UPTD SDN Planggaran Timur 3;
- 37) UPTD SDN Tapaan;
- 38) UPTD SDN Tebanah 1;
- 39) UPTD SDN Tebanah 2;
- 40) UPTD SDN Terosan 1;
- 41) UPTD SDN Terosan 2;
- 42) UPTD SDN Terosan 3;
- 43) UPTD SDN Terosan 4;
- 44) UPTD SDN Terosan 5;
- 45) UPTD SDN Tlagah 1;
- 46) UPTD SDN Tlagah 3;
- 47) UPTD SDN Tlagah 4;
- 48) UPTD SDN Tolang 1;
- 49) UPTD SDN Tolang 2;
- 50) UPTD SDN Trapang;
- 51) UPTD SDN Anggersek 1;
- 52) UPTD SDN Anggersek 2;
- 53) UPTD SDN Banjar Tabulu 1;
- 54) UPTD SDN Banjar Tabulu 2;
- 55) UPTD SDN Banjar Tabulu 3;
- 56) UPTD SDN Banjar Talela 1;
- 57) UPTD SDN Banjar Talela 2;
- 58) UPTD SDN Banjar Talela 3;
- 59) UPTD SDN Batokarang 1;
- 60) UPTD SDN Dharma Camplong 1;
- 61) UPTD SDN Dharma Camplong 2;
- 62) UPTD SDN Dharma Camplong 3;
- 63) UPTD SDN Dharma Camplong 4;
- 64) UPTD SDN Dharma Tanjung 1;
- 65) UPTD SDN Dharma Tanjung 2;
- 66) UPTD SDN Dharma Tanjung 3;
- 67) UPTD SDN Madupat 1;
- 68) UPTD SDN Madupat 2;
- 69) UPTD SDN Madupat 3;
- 70) UPTD SDN Madupat 5;
- 71) UPTD SDN Pamolaan 1;
- 72) UPTD SDN Pamolaan 2;
- 73) UPTD SDN Pamolaan 3;

- 74) UPTD SDN Pamolaan 4;
- 75) UPTD SDN Plampaan 1;
- 76) UPTD SDN Plampaan 2;
- 77) UPTD SDN Plampaan 3;
- 78) UPTD SDN Prajjan 1;
- 79) UPTD SDN Rabasan 1 Camplong;
- 80) UPTD SDN Rabasan 2 Camplong;
- 81) UPTD SDN Rabasan 3 Camplong;
- 82) UPTD SDN Sejati 1;
- 83) UPTD SDN Sejati 2;
- 84) UPTD SDN Sejati 4;
- 85) UPTD SDN Sejati 5;
- 86) UPTD SDN Sejati 6;
- 87) UPTD SDN Taddan 1;
- 88) UPTD SDN Taddan 2;
- 89) UPTD SDN Tambaan 1;
- 90) UPTD SDN Tambaan 2;
- 91) UPTD SDN Tambaan 3;
- 92) UPTD SDN Tambaan 4;
- 93) UPTD SDN Tambaan 5;
- 94) UPTD SDN Asemnonggal 1;
- 95) UPTD SDN Asemnonggal 2;
- 96) UPTD SDN Asemraja 1;
- 97) UPTD SDN Asemraja 2;
- 98) UPTD SDN Bancelok 1;
- 99) UPTD SDN Bancelok 2;
- 100) UPTD SDN Bancelok 3;
- 101) UPTD SDN Buker 1;
- 102) UPTD SDN Buker 3;
- 103) UPTD SDN Buker 4;
- 104) UPTD SDN Jrengik 1;
- 105) UPTD SDN Jrengik 2;
- 106) UPTD SDN Jrengik 4;
- 107) UPTD SDN Jungkarang 1;
- 108) UPTD SDN Jungkarang 3;
- 109) UPTD SDN Jungkarang 4;
- 110) UPTD SDN Kalangan Praoh 1;
- 111) UPTD SDN Kalangan Praoh 2;
- 112) UPTD SDN Kotah 2;
- 113) UPTD SDN Kotah 3;
- 114) UPTD SDN Majangan 1;
- 115) UPTD SDN Malaka 1;
- 116) UPTD SDN Malaka 2;
- 117) UPTD SDN Margantoko 1;
- 118) UPTD SDN Margantoko 2;
- 119) UPTD SDN Margantoko 3;
- 120) UPTD SDN Panyepen 1;
- 121) UPTD SDN Panyepen 3;
- 122) UPTD SDN Panyepen 4;
- 123) UPTD SDN Plakaran 1;
- 124) UPTD SDN Plakaran 2;
- 125) UPTD SDN Taman 1 Jrengik;
- 126) UPTD SDN Taman 2 Jrengik;
- 127) UPTD SDN Bluuran 1;

- 128) UPTD SDN Bluuran 2;
- 129) UPTD SDN Bluuran 3;
- 130) UPTD SDN Bulmatet 1;
- 131) UPTD SDN Bulmatet 2;
- 132) UPTD SDN Gunung Kesan 1;
- 133) UPTD SDN Gunung Kesan 2;
- 134) UPTD SDN Gunung Kesan 3;
- 135) UPTD SDN Gunung Kesan 4;
- 136) UPTD SDN Karangpenang Oloh 1;
- 137) UPTD SDN Karangpenang Oloh 2;
- 138) UPTD SDN Karangpenang Oloh 4;
- 139) UPTD SDN Karangpenang Onjur 1;
- 140) UPTD SDN Karangpenang Onjur 2;
- 141) UPTD SDN Poreh 1;
- 142) UPTD SDN Poreh 2;
- 143) UPTD SDN Tlambah 1;
- 144) UPTD SDN Tlambah 2;
- 145) UPTD SDN Tlambah 3;
- 146) UPTD SDN Bajrasokah 1;
- 147) UPTD SDN Bajrasokah 2;
- 148) UPTD SDN Bajrasokah 3;
- 149) UPTD SDN Banjar 1;
- 150) UPTD SDN Banjar 2;
- 151) UPTD SDN Banjar 3;
- 152) UPTD SDN Banyukapah 1;
- 153) UPTD SDN Banyukapah 2;
- 154) UPTD SDN Banyukapah 3;
- 155) UPTD SDN Batoporo Barat 1;
- 156) UPTD SDN Batoporo Barat 2;
- 157) UPTD SDN Batoporo Barat 3;
- 158) UPTD SDN Batoporo Barat 4;
- 159) UPTD SDN Batoporo Timur 1;
- 160) UPTD SDN Batoporo Timur 3;
- 161) UPTD SDN Daleman 1;
- 162) UPTD SDN Gunung Eleh 1;
- 163) UPTD SDN Gunung Eleh 2;
- 164) UPTD SDN Gunung Eleh 3;
- 165) UPTD SDN Kedungdung 1;
- 166) UPTD SDN Kedungdung 3;
- 167) UPTD SDN Komis 1;
- 168) UPTD SDN Komis 2;
- 169) UPTD SDN Kramat 1;
- 170) UPTD SDN Kramat 2;
- 171) UPTD SDN Moktesareh 1;
- 172) UPTD SDN Moktesareh 2;
- 173) UPTD SDN Moktesareh 3;
- 174) UPTD SDN Nyeloh 1;
- 175) UPTD SDN Nyeloh 2;
- 176) UPTD SDN Ombul 1;
- 177) UPTD SDN Ombul 2;
- 178) UPTD SDN Pajeruan 1;
- 179) UPTD SDN Pajeruan 2;
- 180) UPTD SDN Pajeruan 3;
- 181) UPTD SDN Pajeruan 4;

- 182) UPTD SDN Palenggiyan 1;
- 183) UPTD SDN Palenggiyan 2;
- 184) UPTD SDN Palenggiyan 3;
- 185) UPTD SDN Pasarenan 2;
- 186) UPTD SDN Rabasan 1 Kedungdung;
- 187) UPTD SDN Rabasan 2 Kedungdung;
- 188) UPTD SDN Rabasan 3 Kedungdung;
- 189) UPTD SDN Rahayu 1;
- 190) UPTD SDN Rahayu 2;
- 191) UPTD SDN Banyusokah 1;
- 192) UPTD SDN Banyusokah 2;
- 193) UPTD SDN Bira Barat 1;
- 194) UPTD SDN Bira Barat 2;
- 195) UPTD SDN Bira Barat 3;
- 196) UPTD SDN Bunten Barat 1;
- 197) UPTD SDN Bunten Barat 2;
- 198) UPTD SDN Bunten Barat 3;
- 199) UPTD SDN Bunten Barat 4;
- 200) UPTD SDN Bunten Timur 2;
- 201) UPTD SDN Bunten Timur 3;
- 202) UPTD SDN Karanganyar 1 Ketapang;
- 203) UPTD SDN Karanganyar 2 Ketapang;
- 204) UPTD SDN Ketapang Barat 1;
- 205) UPTD SDN Ketapang Barat 2;
- 206) UPTD SDN Ketapang Barat 3;
- 207) UPTD SDN Ketapang Barat 4;
- 208) UPTD SDN Ketapang Barat 5;
- 209) UPTD SDN Ketapang Barat 6;
- 210) UPTD SDN Ketapang Daya 1;
- 211) UPTD SDN Ketapang Daya 2;
- 212) UPTD SDN Ketapang Daya 4;
- 213) UPTD SDN Ketapang Daya 5;
- 214) UPTD SDN Ketapang Daya 6;
- 215) UPTD SDN Ketapang Laok 1;
- 216) UPTD SDN Ketapang Laok 2;
- 217) UPTD SDN Ketapang Laok 3;
- 218) UPTD SDN Ketapang Laok 4;
- 219) UPTD SDN Ketapang Timur 1;
- 220) UPTD SDN Ketapang Timur 4;
- 221) UPTD SDN Pancor 1;
- 222) UPTD SDN Pancor 3;
- 223) UPTD SDN Pangereman 1;
- 224) UPTD SDN Pangereman 2;
- 225) UPTD SDN Pangereman 3;
- 226) UPTD SDN Paopale Daya 1;
- 227) UPTD SDN Paopale Daya 2;
- 228) UPTD SDN Paopale Laok 2;
- 229) UPTD SDN Paopale Laok 3;
- 230) UPTD SDN Paopale Laok 4;
- 231) UPTD SDN Paopale Laok 5;
- 232) UPTD SDN Paopale Laok 6;
- 233) UPTD SDN Paopale Laok 7;
- 234) UPTD SDN Rabiyan 2;
- 235) UPTD SDN Angsokah 1;

- 236) UPTD SDN Angsokah 2;
- 237) UPTD SDN Angsokah 3;
- 238) UPTD SDN Astapah 1;
- 239) UPTD SDN Astapah 2;
- 240) UPTD SDN Gersempal 1;
- 241) UPTD SDN Gersempal 2;
- 242) UPTD SDN Jrangoan 1;
- 243) UPTD SDN Kamondung 1;
- 244) UPTD SDN Kamondung 2;
- 245) UPTD SDN Kamondung 3;
- 246) UPTD SDN Karanggayam 1;
- 247) UPTD SDN Karanggayam 2;
- 248) UPTD SDN Karanggayam 3;
- 249) UPTD SDN Karanggayam 4;
- 250) UPTD SDN Karangnangger 1;
- 251) UPTD SDN Karangnangger 2;
- 252) UPTD SDN Kebunsareh 1;
- 253) UPTD SDN Kebunsareh 2;
- 254) UPTD SDN Madulang 1;
- 255) UPTD SDN Madulang 2;
- 256) UPTD SDN Madulang 3;
- 257) UPTD SDN Meteng 1;
- 258) UPTD SDN Meteng 2;
- 259) UPTD SDN Napo Daya;
- 260) UPTD SDN Napo Laok 2;
- 261) UPTD SDN Omben 1;
- 262) UPTD SDN Omben 2;
- 263) UPTD SDN Omben 3;
- 264) UPTD SDN Pandan 1;
- 265) UPTD SDN Pandan 2;
- 266) UPTD SDN Pandan 3;
- 267) UPTD SDN Rapa Daya 2;
- 268) UPTD SDN Rapa Laok 1;
- 269) UPTD SDN Rapa Laok 2;
- 270) UPTD SDN Rongdalem 1;
- 271) UPTD SDN Rongdalem 2;
- 272) UPTD SDN Sogiyan 1;
- 273) UPTD SDN Sogiyan 2;
- 274) UPTD SDN Sogiyan 3;
- 275) UPTD SDN Tambak 1;
- 276) UPTD SDN Tambak 2;
- 277) UPTD SDN Tambak 3;
- 278) UPTD SDN Temoran 1;
- 279) UPTD SDN Temoran 2;
- 280) UPTD SDN Apaan 1;
- 281) UPTD SDN Apaan 2;
- 282) UPTD SDN Gulbung 1;
- 283) UPTD SDN Gulbung 3;
- 284) UPTD SDN Gulbung 4;
- 285) UPTD SDN Pacanggaan 1;
- 286) UPTD SDN Pacanggaan 2;
- 287) UPTD SDN Pangarengan 1;
- 288) UPTD SDN Pangarengan 2;
- 289) UPTD SDN Pangarengan 3;

- 290) UPTD SDN Panyerangan 1;
- 291) UPTD SDN Panyerangan 2;
- 292) UPTD SDN Panyerangan 3;
- 293) UPTD SDN Ragung 1;
- 294) UPTD SDN Ragung 2;
- 295) UPTD SDN Ragung 3;
- 296) UPTD SDN Ragung 4;
- 297) UPTD SDN Bapelle 1;
- 298) UPTD SDN Gunung Rancak 1;
- 299) UPTD SDN Gunung Rancak 2;
- 300) UPTD SDN Gunung Rancak 3;
- 301) UPTD SDN Jelgung 1;
- 302) UPTD SDN Jelgung 2;
- 303) UPTD SDN Jelgung 3;
- 304) UPTD SDN Jelgung 4;
- 305) UPTD SDN Lepelle 1;
- 306) UPTD SDN Lepelle 2;
- 307) UPTD SDN Lepelle 3;
- 308) UPTD SDN Pandiyangan 1;
- 309) UPTD SDN Pandiyangan 2;
- 310) UPTD SDN Pandiyangan 3;
- 311) UPTD SDN Robatal 1;
- 312) UPTD SDN Robatal 2;
- 313) UPTD SDN Robatal 3;
- 314) UPTD SDN Sawah Tengah 1;
- 315) UPTD SDN Sawah Tengah 2;
- 316) UPTD SDN Sawah Tengah 3;
- 317) UPTD SDN Torjunan 1;
- 318) UPTD SDN Torjunan 2;
- 319) UPTD SDN Torjunan 3;
- 320) UPTD SDN Tragih 1;
- 321) UPTD SDN Tragih 2;
- 322) UPTD SDN Aengsareh 1;
- 323) UPTD SDN Aengsareh 2;
- 324) UPTD SDN Aengsareh 3;
- 325) UPTD SDN Banyuanyar 1;
- 326) UPTD SDN Banyuanyar 2;
- 327) UPTD SDN Banyuanyar 3;
- 328) UPTD SDN Banyuanyar 4;
- 329) UPTD SDN Banyumas;
- 330) UPTD SDN Baruh 1;
- 331) UPTD SDN Baruh 2;
- 332) UPTD SDN Baruh 3;
- 333) UPTD SDN Dalpenang 1;
- 334) UPTD SDN Dalpenang 2;
- 335) UPTD SDN Dalpenang 3;
- 336) UPTD SDN Gunung Maddah 1;
- 337) UPTD SDN Gunung Maddah 2;
- 338) UPTD SDN Gunung Maddah 3;
- 339) UPTD SDN Gunung Maddah 4;
- 340) UPTD SDN Gunung Maddah 5;
- 341) UPTD SDN Gunung Sekar 1;
- 342) UPTD SDN Gunung Sekar 2;
- 343) UPTD SDN Gunung Sekar 4;

- 344) UPTD SDN Gunung Sekar 5;
- 345) UPTD SDN Gunung Sekar 6;
- 346) UPTD SDN Kamuning 1;
- 347) UPTD SDN Kamuning 2;
- 348) UPTD SDN Kamuning 3;
- 349) UPTD SDN Karangdalem 1;
- 350) UPTD SDN Karangdalem 3;
- 351) UPTD SDN Karangdalem 4;
- 352) UPTD SDN Karangdalem 5;
- 353) UPTD SDN Pulau Mandangin 1;
- 354) UPTD SDN Pulau Mandangin 2;
- 355) UPTD SDN Pulau Mandangin 3;
- 356) UPTD SDN Pulau Mandangin 4;
- 357) UPTD SDN Pulau Mandangin 5;
- 358) UPTD SDN Pulau Mandangin 6;
- 359) UPTD SDN Pulau Mandangin 7;
- 360) UPTD SDN Pulau Mandangin 8;
- 361) UPTD SDN Pulau Mandangin 9;
- 362) UPTD SDN Panggung 1;
- 363) UPTD SDN Panggung 2;
- 364) UPTD SDN Pangilen 1;
- 365) UPTD SDN Pangilen 2;
- 366) UPTD SDN Pangilen 3;
- 367) UPTD SDN Pangilen 4;
- 368) UPTD SDN Paseyan 1;
- 369) UPTD SDN Paseyan 2;
- 370) UPTD SDN Pekalongan 1;
- 371) UPTD SDN Pekalongan 2;
- 372) UPTD SDN Pekalongan 3;
- 373) UPTD SDN Polagan 1;
- 374) UPTD SDN Polagan 2;
- 375) UPTD SDN Polagan 3;
- 376) UPTD SDN Polagan 4;
- 377) UPTD SDN Rongtengah 1;
- 378) UPTD SDN Rongtengah 2;
- 379) UPTD SDN Rongtengah 3;
- 380) UPTD SDN Rongtengah 4;
- 381) UPTD SDN Rongtengah 5;
- 382) UPTD SDN Tamansareh 1;
- 383) UPTD SDN Tamansareh 2;
- 384) UPTD SDN Tanggumong 1;
- 385) UPTD SDN Tanggumong 2;
- 386) UPTD SDN Bira Tengah 1;
- 387) UPTD SDN Bira Tengah 2;
- 388) UPTD SDN Bira Tengah 3;
- 389) UPTD SDN Bira Tengah 4;
- 390) UPTD SDN Bira Tengah 5;
- 391) UPTD SDN Bira Timur 1;
- 392) UPTD SDN Bira Timur 2;
- 393) UPTD SDN Bira Timur 3;
- 394) UPTD SDN Bira Timur 5;
- 395) UPTD SDN Sokobanah Daya 1;
- 396) UPTD SDN Sokobanah Daya 2;
- 397) UPTD SDN Sokobanah Daya 3;

- 398) UPTD SDN Sokobanah Daya 4;
- 399) UPTD SDN Sokobanah Daya 5;
- 400) UPTD SDN Sokobanah Laok 1;
- 401) UPTD SDN Sokobanah Laok 2;
- 402) UPTD SDN Sokobanah Laok 3;
- 403) UPTD SDN Sokobanah Tengah 2;
- 404) UPTD SDN Sokobanah Tengah 3;
- 405) UPTD SDN Sokobanah Tengah 4;
- 406) UPTD SDN Sokobanah Tengah 5;
- 407) UPTD SDN Sokobanah Tengah 6;
- 408) UPTD SDN Tamberu Barat 1;
- 409) UPTD SDN Tamberu Barat 2;
- 410) UPTD SDN Tamberu Barat 3;
- 411) UPTD SDN Tamberu Barat 4;
- 412) UPTD SDN Tamberu Daya 1;
- 413) UPTD SDN Tamberu Daya 3;
- 414) UPTD SDN Tamberu Daya 4;
- 415) UPTD SDN Tamberu Daya 6;
- 416) UPTD SDN Tamberu Laok 1;
- 417) UPTD SDN Tamberu Laok 3;
- 418) UPTD SDN Tamberu Laok 4;
- 419) UPTD SDN Tamberu Laok 5;
- 420) UPTD SDN Tamberu Timur;
- 421) UPTD SDN Tobai Barat 1;
- 422) UPTD SDN Tobai Barat 2;
- 423) UPTD SDN Tobai Barat 3;
- 424) UPTD SDN Tobai Tengah 1;
- 425) UPTD SDN Tobai Tengah 2;
- 426) UPTD SDN Tobai Timur 1;
- 427) UPTD SDN Tobai Timur 2;
- 428) UPTD SDN Tobai Timur 4;
- 429) UPTD SDN Tobai Timur 5;
- 430) UPTD SDN Bangsah;
- 431) UPTD SDN Bundah;
- 432) UPTD SDN Junok;
- 433) UPTD SDN Klobur;
- 434) UPTD SDN Labang;
- 435) UPTD SDN Labuhan 1;
- 436) UPTD SDN Labuhan 3;
- 437) UPTD SDN Labuhan 4;
- 438) UPTD SDN Labuhan 5;
- 439) UPTD SDN Labuhan 6;
- 440) UPTD SDN Marparan;
- 441) UPTD SDN Noreh 1;
- 442) UPTD SDN Noreh 3;
- 443) UPTD SDN Noreh 4;
- 444) UPTD SDN Noreh 5;
- 445) UPTD SDN Noreh 6;
- 446) UPTD SDN Plasah 1;
- 447) UPTD SDN Plasah 2;
- 448) UPTD SDN Sreseh 1;
- 449) UPTD SDN Sreseh 2;
- 450) UPTD SDN Sreseh 3;
- 451) UPTD SDN Taman 1 Sreseh;

- 452) UPTD SDN Taman 2 Sreseh;
- 453) UPTD SDN Banjar Billah 1;
- 454) UPTD SDN Banjar Billah 2;
- 455) UPTD SDN Barunggagah 1;
- 456) UPTD SDN Barunggagah 3;
- 457) UPTD SDN Batorasang 1;
- 458) UPTD SDN Batorasang 2;
- 459) UPTD SDN Batorasang 3;
- 460) UPTD SDN Batorasang 4;
- 461) UPTD SDN Birem 1;
- 462) UPTD SDN Birem 2;
- 463) UPTD SDN Birem 3;
- 464) UPTD SDN Birem 4;
- 465) UPTD SDN Bringin 1;
- 466) UPTD SDN Bringin 2;
- 467) UPTD SDN Karanganyar 1 Tambelangan;
- 468) UPTD SDN Karanganyar 2 Tambelangan;
- 469) UPTD SDN Karanganyar 3 Tambelangan;
- 470) UPTD SDN Karanganyar 4 Tambelangan;
- 471) UPTD SDN Karanganyar 5 Tambelangan;
- 472) UPTD SDN Mambulu Barat 1;
- 473) UPTD SDN Mambulu Barat 2;
- 474) UPTD SDN Mambulu Barat 3;
- 475) UPTD SDN Mambulu Barat 4;
- 476) UPTD SDN Samaran 1;
- 477) UPTD SDN Samaran 2;
- 478) UPTD SDN Samaran 3;
- 479) UPTD SDN Sember 1;
- 480) UPTD SDN Sember 3;
- 481) UPTD SDN Sember 4;
- 482) UPTD SDN Sember 5;
- 483) UPTD SDN Tambelangan 1;
- 484) UPTD SDN Tambelangan 2;
- 485) UPTD SDN Tambelangan 3;
- 486) UPTD SDN Tambelangan 4;
- 487) UPTD SDN Bringin Nonggal 1;
- 488) UPTD SDN Bringin Nonggal 2;
- 489) UPTD SDN Dulang 1;
- 490) UPTD SDN Dulang 2;
- 491) UPTD SDN Dulang 4;
- 492) UPTD SDN Jeruk Porot 1;
- 493) UPTD SDN Jeruk Porot 2;
- 494) UPTD SDN Kanjar 1;
- 495) UPTD SDN Kanjar 2;
- 496) UPTD SDN Kara 1;
- 497) UPTD SDN Kodak 1;
- 498) UPTD SDN Kodak 2;
- 499) UPTD SDN Krampon 1;
- 500) UPTD SDN Krampon 2;
- 501) UPTD SDN Krampon 3;
- 502) UPTD SDN Pangongseyan 1;
- 503) UPTD SDN Pangongseyan 2;
- 504) UPTD SDN Pangongseyan 3;
- 505) UPTD SDN Patapan 1;

- 506) UPTD SDN Patapan 2;
- 507) UPTD SDN Patarongan 1;
- 508) UPTD SDN Patarongan 2;
- 509) UPTD SDN Tanamera 1;
- 510) UPTD SDN Tanamera 3;
- 511) UPTD SDN Torjun 1;
- 512) UPTD SDN Torjun 2;
- 513) UPTD SDN Torjun 4.
- c. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
terdiri atas :
 - 1) UPTD SMPN 1 BANYUATES;
 - 2) UPTD SMPN 2 BANYUATES;
 - 3) UPTD SMPN 3 BANYUATES;
 - 4) UPTD SMPN 4 BANYUATES;
 - 5) UPTD SMPN 1 CAMPLONG;
 - 6) UPTD SMPN 2 CAMPLONG;
 - 7) UPTD SMPN 3 CAMPLONG;
 - 8) UPTD SMPN 4 CAMPLONG;
 - 9) UPTD SMPN 5 CAMPLONG;
 - 10) UPTD SMPN 1 JRENGIK;
 - 11) UPTD SMPN 2 JRENGIK;
 - 12) UPTD SMPN 3 JRENGIK;
 - 13) UPTD SMPN 4 JRENGIK;
 - 14) UPTD SMPN 1 KARANGPENANG;
 - 15) UPTD SMPN 2 KARANGPENANG;
 - 16) UPTD SMPN 1 KEDUNGDUNG;
 - 17) UPTD SMPN 2 KEDUNGDUNG;
 - 18) UPTD SMPN 3 KEDUNGDUNG;
 - 19) UPTD SMPN 4 KEDUNGDUNG;
 - 20) UPTD SMPN 1 KETAPANG;
 - 21) UPTD SMPN 2 KETAPANG;
 - 22) UPTD SMPN 3 KETAPANG;
 - 23) UPTD SMPN 4 KETAPANG;
 - 24) UPTD SMPN 1 OMBEN;
 - 25) UPTD SMPN 2 OMBEN;
 - 26) UPTD SMPN 3 OMBEN;
 - 27) UPTD SMPN 4 OMBEN;
 - 28) UPTD SMPN 1 PANGARENGAN;
 - 29) UPTD SMPN 2 PANGARENGAN;
 - 30) UPTD SMPN 3 PANGARENGAN;
 - 31) UPTD SMPN 1 ROBATAL;
 - 32) UPTD SMPN 2 ROBATAL;
 - 33) UPTD SMPN 3 ROBATAL;
 - 34) UPTD SMPN 1 SAMPANG;
 - 35) UPTD SMPN 2 SAMPANG;
 - 36) UPTD SMPN 3 SAMPANG;
 - 37) UPTD SMPN 4 SAMPANG;
 - 38) UPTD SMPN 5 SAMPANG;
 - 39) UPTD SMPN 6 SAMPANG;
 - 40) UPTD SMPN 7 SAMPANG;
 - 41) UPTD SMPN 8 SAMPANG;
 - 42) UPTD SMPN 9 SAMPANG;
 - 43) UPTD SMPN 1 SOKOBANAH;
 - 44) UPTD SMPN 2 SOKOBANAH;

- 45) UPTD SMPN 1 SRESEH;
- 46) UPTD SMPN 2 SRESEH;
- 47) UPTD SMPN 1 TAMBELANGAN;
- 48) UPTD SMPN 2 TAMBELANGAN;
- 49) UPTD SMPN 3 TAMBELANGAN;
- 50) UPTD SMPN 1 TORJUN;
- 51) UPTD SMPN 2 TORJUN;
- 52) UPTD SMPN 3 TORJUN; dan
- 53) UPTD SMPN 4 TORJUN.

BAB III

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Satuan pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.
- (4) Satuan pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang berlaku dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (7) Satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :
 - a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;

- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Jumlah peserta didik pada setiap UPTD satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) UPTD satuan pendidikan yang kurang berpotensi untuk berkembang dapat dilakukan penggabungan.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas instansi induknya.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal bagi UPTD TKN, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar bagi UPTD SDN dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama bagi UPTD SMPN, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - b. melaksanakan pengelolaan kurikulum pendidikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kesiswaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana sekolah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD TKN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Susunan Organisasi UPTD SDN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional Guru.
- (3) Susunan Organisasi UPTD SMPN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD, Jabatan Fungsional Guru dan urusan Tata Usaha.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional jenjang pertama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta Instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi setiap pelaksana yang ada dalam satuan organisasi, dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf yang berada di bawah jajarannya; dan
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Pelaksana bertanggung jawab menyusun, mengolah dan menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi juga kepada Kepala Dinas dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB.....

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari unsur PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD diisi oleh Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PNS yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural; dan
 - d. pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, keterkaitan, relasi, dan wawasan kebangsaan terhadap kondisi masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat yang menjalankan tugasnya berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Desember 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

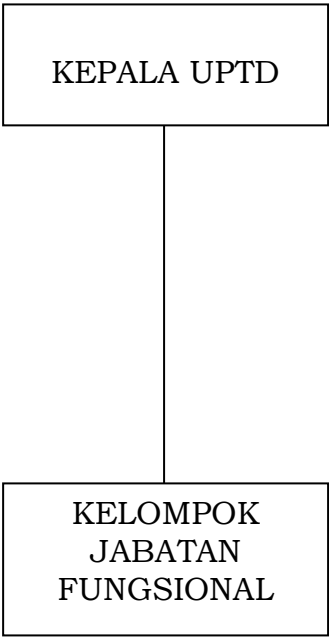
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 139

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 139 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG



BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI